

DESANTARA

WORKING PAPERS

RETHINKING INDONESIA

1

JANUARI 2022

Menyeimbangkan Hubungan

Negara, Agama, dan Budaya di Indonesia

DESANTARA Working Papers: Rethinking Indonesia No 1 Januari 2022

Menyeimbangkan Hubungan Negara, Agama, dan Budaya di Indonesia

Penyusun : Alamsyah M Dja'far

Halaman : 6 hal.

Tata letak; Desantara

Tahun: 2022

Penerbit: Desantara Foundation

Komplek Depok Lama Alam Permai K3

Depok - Jawa Barat 16431

[E] office@desantara.or.id; desantara.or.id@gmail.com

[W] www.desantara.or.id

MENYEIMBANGKAN RELASI NEGARA, AGAMA, DAN BUDAYA

PENGANTAR

Dalam 23 tahun sejak reformasi bergulir, hubungan negara, agama, dan budaya di Indonesia mengalami pasang-surut. Perubahan-perubahan kepemimpinan negara dan pemerintah memiliki pengaruh besar dalam perubahan-perubahan relasi tersebut. Pandangan ini memang lebih terlihat menempatkan kedua institusi itu sebagai faktor dominan ketimbang komplementer.

Dalam relasi negara dan agama, dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dinilai lebih berani menindak orang dan kelompok-kelompok yang dikategorikan intoleran dan ekstrem. Langkah itu membuat kelompok-kelompok itu tidak cukup mendapat tempat dan kekuasaan di institusi-institusi negara dan pemerintah. Kebijakan Joko Widodo untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme ini mendapat kritik sebagian kalangan (Nurkhoiron, 2021).

Pada isu kebudayaan, pemerintah Joko Widodo menggelorakan Revolusi Mental yang diklaim sebagai “gerakan kebudayaan”. Seperti Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bagaimana mengoperasionalisasi konsep tersebut, masih belum begitu jelas hingga hari ini.

Menempatkan peran negara dan pemerintah sebagai satu-satunya faktor tentu saja tidak dapat

menggambarkan secara utuh apa yang tengah berlangsung. Kenyataannya, dua institusi gigantik lain, yakni masyarakat sipil dan pasar, telah memainkan pengaruh dalam berbagai derajat dan variasinya.

Sekarang ini, ruang masyarakat sipil untuk berekspresi dipandang makin menyusut. Agenda-agenda jangka panjang mereka terserap ke dalam agenda negara dan pemerintah. Begitu pula yang terjadi dengan kiprah aktor-aktor organisasi masyarakat sipil. Sebagian mereka masuk menjadi elite-elite pemerintah yang tengah berkuasa. Situasi ini berdampak pada makin terpinggirkannya elite-elite nonformal dan bergesernya lokus legitimasi dari aktivisme ke formalisme (Lay dan Eng, 2020).

Tulisan ini berangkat dari hipotesis bahwa kualitas kehidupan warga dan negara- bangsa, termasuk di tingkat lokal, berjalan jauh lebih baik ketika muncul keseimbangan hubungan di antara tiga institusi: negara, masyarakat sipil, dan pasar (Flora, 2003). Sebaliknya, jika terjadi ketimpangan hubungan di antara ketiganya akan melahirkan dampak-dampak negatif seperti komodifikasi budaya, intoleransi dan ekstremisme, menguatnya oligarki, dan berlangsungnya pelanggaran hak asasi manusia. Korban paling nyata dari ketimpangan hubungan itu adalah kelompok minoritas dan rentan, termasuk di dalamnya perempuan, anak, dan minoritas agama/keyakinan.

Sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, Desantara memberi perhatian besar pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat, khususnya kelompok marginal, melalui pendekatan kultural.

Kertas kerja ini berusaha mendiskusikan dan merumuskan relasi ideal agama, budaya, dan negara di Indonesia. Secara lebih terperinci, kertas kerja ini berusaha menyajikan tiga isu utama:

1. Tantangan-tantangan aktual karena relasi agama, budaya, dan negara yang timpang
2. Penyebab masalah-masalah utama dalam isu agama dan budaya.
3. Rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah-masalah agama, budaya, dan negara Indonesia.

METODE DAN DATA

Kertas kerja ini disusun dan dikembangkan dari hasil diskusi “*Rethinking Indonesia: Relasi Agama, Budaya, dan Negara*” pada Jumat, 3 Desember 2021, pukul 14.00-16.30 WIB. Diskusi terbatas ini dilakukan melalui dalam jaringan (daring) dengan menghadirkan Muhammad Nurkhoiron sebagai pemantik. Nurkhoiron, pembina Yayasan Desantara dan mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Diskusi yang difasilitasi Alamsyah M Dja’far, peneliti Desantara, ini diikuti tujuh peserta. Mereka merupakan jaringan Desantara di berbagai daerah: Alfis Nurhayati (dosen IAIN Jember Jawa Timur), Asman Aziz (pendiri Institut Naladwipa Kalimantan Timur), Kusairi (peneliti radikalisme dan terorisme), Mubarok (aktivis Yayasan

Lapar), Riza Bahtiar (peneliti Kindai Institut Kalimantan Selatan), Sari Narulita (aktivitas Alimat Jakarta), Subhi Azhari (Direktur Eksekutif Inklusif).

Hasil diskusi tersebut selanjutnya dikembangkan dengan hasil-hasil kajian lain berupa buku, hasil riset, dan dokumen lain yang relevan. Ini dilakukan untuk menemukan benang merah terkait tema-tema yang tengah dibicarakan sekaligus memberi analisis terhadap temuan tersebut. Setelah itu, kertas kerja menyusun rekomendasi untuk pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan-tantangan yang diangkat dalam kertas kerja.

TIGA TANTANGAN DAN ISU-ISU KRUSIAL

Komodifikasi Budaya. Secara sederhana, komodifikasi budaya adalah usaha dan proses untuk menjadikan berbagai unsur budaya sebagai alat komoditas yang dapat diperjualbelikan (Harvey, 2002). Bentuk paling nyata berkembang dalam industri pariwisata di Indonesia. Seni dan tradisi masyarakat lokal menjadi tontonan sedang barang-barang kesenian yang mereka buat dijual belikan sebagai cendera mata.

Proses komodifikasi semacam ini terus berlangsung dengan semakin menguatnya tren industri wisata seperti desa wisata, kota wisata, atau wisata syariah. Pemerintah menampilkan baju adat mereka dalam acara-acara pemerintahan seperti 17 Agustus atau hari jadi pemerintah daerah.

Dari sisi ekonomi, proses ini tentu saja mendatangkan keuntungan material. Namun, dampak negatif yang tampak, terpinggirkannya eksistensi budaya komunitas lokal dalam pengertian yang luas. Mereka memang diakui sebagai

komunitas adat atau masyarakat sebagai daya tarik pariwisata yang tampil dalam acara-acara kesenian, namun tidak untuk keyakinan-keyakinan mereka, termasuk kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang mereka alami (Aziz, 2021). Situasi ini dialami oleh banyak masyarakat adat dan agama-agama lokal di Indonesia seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Dayak di Kalimantan, Kaharingan, Bissu dan Kajang di Sulawesi Selatan.

Sekarang ini, komunitas-komunitas tersebut ditengarai menghadapi kesulitan untuk melakukan “kaderisasi” atau pewarisan nilai-nilai budaya arti yang lebih luas kepada generasi yang lebih muda. Tantangan itu dipengaruhi oleh semakin menguatnya narasi intoleransi dan konservatisme yang menganggap mereka komunitas sesat. Pada saat yang sama pemerintah tidak cukup memiliki kepedulian untuk melindungi hak-hak mereka.

Pengalaman panjang menjadi korban diskriminasi mungkin membuat mereka acapkali lebih banyak bicara tentang diri mereka dan bagaimana bisa bertahan. Usaha-usaha untuk membicarakan isu-isu besar di tingkat nasional dan global, masih belum menjadi agenda utama.

Dependensi masyarakat sipil. Kondisi dependensi ini salah satu akibat dari ketimpangan relasi negara dan masyarakat sipil. Negara yang lebih kuat dan dominan, sementara masyarakat sipil melemah. Dewasa ini gerakan organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan dari berbagai arah. Tantangan itu berasal dari upaya-upaya penundukan negara maupun dominasi oligarki (Hamid dan Hermawan, 2020; Tirto, 2020).

Di internal, kekuatan organisasi masyarakat sipil makin melemah akibat perbedaan tajam menyangkut agenda-agenda mereka akibat politik-elektoral di tingkat nasional dan lokal (Hidayatullah, Ngarawula dan Sadhana, 2020). Dalam sejumlah kasus, mereka juga sering terbawa arus dalam merespons agenda-agenda oligarki, ketimbang agenda jangka panjang mereka. Situasi ini tampak menyolok dalam ragam narasi di media digital jelang momen-momen pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Dalam isu melawan intoleransi dan ekstremisme, misalnya, komunitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kurang begitu sejalan. Organisasi pertama dikenal sebagai organisasi terdepan melawan intoleransi dan ekstremisme bersama-sama dengan pemerintah. Sedang yang kedua, mengambil posisi untuk lebih menjaga jarak. Sementara itu, organisasi-organisasi keagamaan baru dinilai lebih mampu mengisi narasi-narasi baru bagi segmen masyarakat perkotaan yang sedang bergairah dalam beragama. Dengan kemampuan itu, mereka berhasil mengumpulkan dana dari anggota dan simpatisan komunitas mereka untuk menjalankan aktivitas komunitas mereka (Jahroni, 2020).

Dalam usaha-usaha mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, gerakan organisasi non-pemerintah menunjukkan segregasi pendekatan yang mencolok. Sebagian mereka yang fokus pada isu-isu hak sipil politik seperti kebebasan berekspresi, informasi, dan hak beragama, tidak banyak memperhatikan atau menghubungkan dengan isu-isu hak ekonomi sosial budaya seperti hak atas lingkungan, tanah, dan pendidikan.

Komunitas dan organisasi perempuan memainkan peran penting dalam berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik, terutama untuk mendorong pengarusutamaan gender dan pemberdayaan komunitas. Sayangnya, aktor-aktor perempuan dan isu pengarusutamaan gender di lingkungan masyarakat sipil secara umum masih memerlukan sinergi dan penguatan.

Intoleransi dan Ekstremisme. Dua tantangan ini menunjukkan hubungan timpang masyarakat-negara. Masyarakat menguat sedang kekuasaan negara dan pemerintah melemah. Bisa dikatakan intoleransi dan ekstremisme lahir dengan cara memanfaatkan keterbukaan demokrasi, sedang negara dan pemerintah gamang bersikap.

Narasi-narasi intoleransi dan ekstremisme, terutama di media sosial, sering muncul dalam bentuk ketidakpuasan, kritik, dan serangan-serangan terhadap aktor dan institusi negara. Fenomena Negara Islam Irak dan Syam (NIIS), contoh konkret dari usaha-usaha masyarakat menawarkan sekaligus menggantikan sistem negara-bangsa dan nilai-nilai demokrasi.

Jika ditelisik lebih jauh, sebagian kasus-kasus intoleransi yang terjadi di tanah air mengandung pesan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap negara dan pemerintah. Perasaan terancam di lingkungan komunitas agama atau etnis tertentu di Indonesia, misalnya, seringkali dipengaruhi oleh pandangan bahwa negara dan pemerintah tidak mampu melindungi mereka. Lebih dari itu, negara dan pemerintah justru dianggap menjadi aktor yang mengancam mereka. Sementara itu, ruang-ruang dialog dan klarifikasi yang

lebih terbuka dan dialogis tidak banyak tersedia.

Relasi dengan negara dan pemerintah tentu saja bukan satu-satunya faktor. Hubungan yang timpang dengan pasar juga menjadi penyebab. Perasaan terancam yang diidap kelompok-kelompok yang bertindak intoleran sering kali dihadapkan pada kenyataan ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang mereka atau orang lain rasakan. Misalnya kasus-kasus lemahnya penegakkan hukum, oligarki, penggusuran, dan pengambilalihan lahan. Oleh pelaku intoleran situasi itu mereka kerangkakan dengan kaca mata identitas tertentu seperti agama atau etnis.

Kesimpulan

Tantangan utama kebudayaan di Indonesia dewasa ini tidak banyak berubah dari sebelumnya, yakni bagaimana membangun hubungan yang seimbang di antara tiga institusi gigantik: negara, masyarakat sipil, dan pasar. Ketimpangan relasi ketiganya telah mengakibatkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan warga dan arah kebudayaan itu sendiri.

Tiga tantangan utama yang mengemuka akibat ketimpangan relasi ketiga institusi itu adalah berlanjutnya komodifikasi budaya, dependensi organisasi masyarakat sipil, dan berkembangnya intoleransi serta ekstremisme. Tantangan komodifikasi budaya dapat diatasi ketika negara dan pemerintah, di tingkat nasional dan lokal, melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat untuk mengekspresikan budaya mereka dalam arti luas.

Dependensi organisasi masyarakat sipil dapat diatasi salah satunya melalui pembangunan kemandirian melalui

kemandirian mendorong dan melaksanakan agenda-agenda jangka panjang dan kemandirian dalam pendanaan untuk menjalankan organisasi. Sementara itu tantangan intoleransi dan ekstremisme, salah satunya bisa diatasi melalui usaha memberi ruang dialog yang lebih

terbuka dan bebas untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat. Dalam jangka panjang, pemerintah, masyarakat, dan pasar harus bersama-sama mengatasi berbagai ketimpangan sosial-ekonomi sebagai sumber intoleransi dan ekstremisme.

REKOMENDASI

1. **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** memberi perlindungan dan jaminan kepada agama lokal dan masyarakat adat untuk mengekspresikan budaya mereka dalam arti luas, termasuk menjalankan agama dan keyakinan, tanpa merasa khawatir mendapat intimidasi dari kelompok masyarakat lain maupun pemidanaan oleh aparat.
2. **Organisasi masyarakat sipil** di tingkat nasional dan lokal mendorong gerakan membuka forum dan ruang dialog dan perjumpaan bagi komunitas adat dan agama-agama lokal untuk saling berdialog dan berinteraksi secara terbuka dengan aktor pemerintah, partai politik, ormas keagamaan, termasuk agama-agama besar yang dianut di Indonesia, termasuk dunia usaha, sebagai bagian memperkuat strategi gerakan dalam merespons tantangan-tantangan di tingkat lokal dan nasional.
3. **Organisasi masyarakat sipil** harus memperkuat konsolidasi dan menyusun agenda bersama dalam mengatasi berbagai isu nasional dan lokal. Sejalan dengan itu, organisasi masyarakat sipil juga harus memberi memperkuat gerakan yang menghubungkan pendekatan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial, sekaligus memperkuat pelibatan aktor perempuan dan pengarusutamaan gender.
4. **Organisasi masyarakat sipil** perlu menyusun langkah-langkah membangun kemandirian gerakan, termasuk dalam hal pendanaan, demi mencapai agenda-agenda strategis. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan langkah-langkah kreatif lain berbasis pendekatan lokal dan nasional.

REFERENSI

- Aziz, A. (2021) "Bisri Effendy: Keberpihakan yang Tak Bersyarat," in M. Djafar, A. dan Miftahussurur (ed.) *Obituari Bisri Effendy: Agama, Kebudayaan, dan Rekonsiliasi*. Depok: Yayasan Desantara, hal. 193–202.
- Flora, C. B. (2003) "Democracy: balancing market, state and civil society," in *Walking Towards Justice: Democratization in Rural Life*. Emerald Group Publishing Limited.
- Hamid, U. dan Hermawan, A. (2020) *Indonesia's Shrinking Civic Space for Protests and Digital Activism*, www.carnegieendowment.org. Tersedia pada: <https://carnegieendowment.org/2020/11/17/indonesia-s-shrinking-civic-space-for-protests-and-digital-activism-pub-83250> (Diakses: 6 Januari 2021).
- Harvey, D. (2002) "The art of rent: globalisation, monopoly and the commodification of culture," *Socialist register*, 38.
- Hidayaturrahman, M., Ngarawula, B. dan Sadhana, K. (2020) "Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Politics*, XX(X), hal. 1–13. doi: 10.1177/2057891120917213.
- Jahroni, J. (2020) "Saudi arabia charity and the institutionalization of Indonesian Salafism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), hal. 35–62.
- Lay, C. dan Eng, N. (2020) "State regulations and elitisation: A study of civil society elites in Indonesia and Cambodia," *Politics and Governance*, 8(3), hal. 97–108.
- Nurkhoiron, M. (2021) "Hak Asasi Manusia , Rezim Keamanan, dan Populisme di Era Joko Widodo," *MIMIKRI*, 7(2), hal. 23–50.
- Tirto (2020) *Di Bawah Jokowi, Oligarki Kian Mencengkeram & Demokrasi Makin Semu*, *Tirto.id*. Tersedia pada: <https://tirto.id/f7XT> (Diakses: 6 Januari 2022).



Desantara adalah lembaga non-pemerintah yang berusaha membangun kemandirian masyarakat sipil, khususnya komunitas sipil marginal, dalam mengelola sumber daya kebudayaan, politik, ekonomi, dan lingkungan. Terdapat tiga program utama yang dijalankan Desantara: penguatan masyarakat sipil dan minoritas; pengembangan pengetahuan; dan pengarusutamaan narasi dan kebijakan.